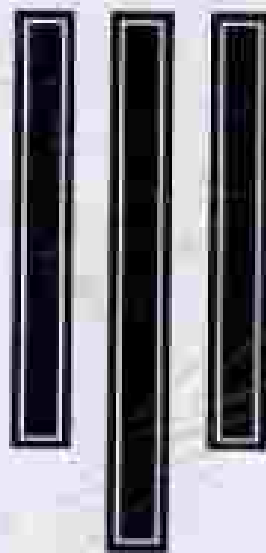




**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau 78512

Alamat Website : www.sanggau.go.id Email : bpkad@sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Sanggau.

Tersusunnya Renja BPKAD Tahun 2026 akan mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi hasil Renja BPKAD tahun lalu serta hasil evaluasi Renja BPKAD tahun berjalan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sanggau, 8 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU



SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19671126 199503 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sanggau	12
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Sanggau	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU	23
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sanggau	24
3.2.1 Tujuan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau	24
3.2.2 Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sanggau	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU	26
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Tingkat Capaian Sasaran Kinerja BPKAD Kabupaten Sanggau 2024	9
Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BPKAD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024	10
Tabel 2.4 Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BPKAD Tahun 2024	11
Tabel 2.5 Analisa SWOT	16
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari proses perencanaan. Apabila perencanaan itu disusun dengan baik dan melibatkan seluruh *stakeholders* dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi, maka pencapaian tujuan yang dicita-citakan akan lebih besar kemungkinannya realisasinya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan dapat membuat suatu perencanaan yang komprehensif guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini.

Di era globalisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini tugas yang dijalankan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah semakin berat. Dengan kemundiriannya, Daerah diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaannya dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah semakin meningkat juga, terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut peran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai *leading sector* di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk merespon segala bentuk dinamika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kian kompleks.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

Melalui kebijakan ini, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Rencana Kerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun 2026. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaian program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran yang ditetapkan dan akan dicapai dalam tahun anggaran 2026 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bahan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi BPKAD sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan anggaran BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Untuk itu, tujuan penyusunan Renja BPKAD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2026 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2023-2029;
2. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2026;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;

4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan bagi setiap aparatur di lingkungan BPKAD dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sanggau
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sanggau
 - 3.2.1. Tujuan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau
 - 3.2.2. Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sanggau
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN SANGGAU

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sanggau khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disini lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2029. Keberhasilan suatu proses pembangunan di tahun-tahun mendatang akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKAD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Tingkat Capaian Kinerja Berdasarkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
2	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguasaan internal pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	B

(data tahun 2024)

Tabel 2.2

Tingkat Capaian Sasaran Kinerja BPKAD Kabupaten Sanggau 2024

No	Sasaran	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	SB				100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	SB				B

(data tahun 2024)

SB= Sangat Berhasil, B= Berhasil, CB= Cukup Berhasil, TB= Tidak Berhasil

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja ke-3 (Tiga) sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dapat dikategorikan **"Sangat Berhasil"** sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

"Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)"

Sasaran ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Badan yang dimulai dari penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran secara terbuka, transparan, tertib dan akuntabel serta tepat waktu dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD sampai dengan triwulan IV tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BPKAD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100	100%
2.	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	69	69	100%
J U M L A H					100%

(data tahun 2024)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dengan metode rata-rata tertimbang data kelompok dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Sasaran 2 :

"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"

Sasaran ini diarahkan agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan dana APBD yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ditetapkan secara transparan, tertib dan akuntabel.

Keberhasilan yang paling utama dari pelaksanaan sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"** adalah Nilai AKIP BPKAD.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BPKAD Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP BPKAD	%	CC	8	100%
J U M L A H					100%

(data tahun 2024)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD"** dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Dana APBD yang dikelola BPKAD dan dianggarkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kedua sasaran di atas adalah sebesar Rp285.567.116,025,13 dan terealisasi sebesar Rp275.292.937,016,00 atau sebesar 96,40%.

Berikut ini terlampir capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebagai berikut:

Code	Project Title / Description of Project	Project Objectives / Impact	Project Status / Progress	Project Budget / Funding	Project Timeline / Duration	Project Performance Indicators (2023)		
						Project Budget (USD)	Project Timeline (Months)	Project Status (On Track / Delayed)
001-001-001-001	Project A: Infrastructure Development	Improve road network and connectivity in rural areas.	Completed	10,000,000 USD	12 months	10,000,000 USD	12 months	On Track
001-001-001-002	Project B: Social Welfare Program	Provide financial support to low-income families.	In Progress	5,000,000 USD	6 months	4,500,000 USD	6 months	On Track
001-001-001-003	Project C: Environmental Conservation	Protect and restore natural habitats and biodiversity.	Completed	8,000,000 USD	18 months	8,000,000 USD	18 months	On Track
001-001-001-004	Project D: Education Program	Improve literacy rates and educational outcomes for children.	In Progress	3,000,000 USD	9 months	2,800,000 USD	9 months	On Track
001-001-001-005	Project E: Health and Nutrition Program	Improve maternal and child health outcomes.	Completed	6,000,000 USD	15 months	6,000,000 USD	15 months	On Track
001-001-001-006	Project F: Agriculture and Livelihoods Program	Support small-scale farmers and improve agricultural productivity.	In Progress	7,000,000 USD	10 months	6,500,000 USD	10 months	On Track
001-001-001-007	Project G: Disaster Preparedness and Response Program	Enhance community resilience and disaster response capabilities.	Completed	4,000,000 USD	8 months	4,000,000 USD	8 months	On Track
001-001-001-008	Project H: Gender Equality and Women's Empowerment Program	Support women's economic participation and leadership.	In Progress	5,500,000 USD	11 months	5,000,000 USD	11 months	On Track
001-001-001-009	Project I: Digital Literacy and Technology Program	Improve digital skills and access to digital services.	Completed	3,500,000 USD	7 months	3,500,000 USD	7 months	On Track
001-001-001-010	Project J: Sustainable Tourism Development Program	Promote sustainable tourism and local economic growth.	In Progress	6,500,000 USD	13 months	6,000,000 USD	13 months	On Track
001-001-001-011	Project K: Urban Planning and Infrastructure Program	Improve urban infrastructure and quality of life in cities.	Completed	12,000,000 USD	24 months	12,000,000 USD	24 months	On Track
001-001-001-012	Project L: Water and Sanitation Program	Improve access to clean water and sanitation facilities.	In Progress	9,000,000 USD	16 months	8,500,000 USD	16 months	On Track
001-001-001-013	Project M: Youth Employment and Skills Training Program	Provide skills training and employment opportunities for youth.	Completed	4,500,000 USD	9 months	4,500,000 USD	9 months	On Track
001-001-001-014	Project N: Climate Change Adaptation Program	Enhance community resilience to climate change impacts.	In Progress	7,500,000 USD	14 months	7,000,000 USD	14 months	On Track
001-001-001-015	Project O: Cultural Heritage Preservation Program	Protect and promote cultural heritage and traditions.	Completed	3,000,000 USD	6 months	3,000,000 USD	6 months	On Track
001-001-001-016	Project P: Renewable Energy Program	Promote the use of clean and sustainable energy sources.	In Progress	8,500,000 USD	17 months	8,000,000 USD	17 months	On Track
001-001-001-017	Project Q: Social Enterprise Development Program	Support the growth of social enterprises and entrepreneurship.	Completed	4,000,000 USD	8 months	4,000,000 USD	8 months	On Track
001-001-001-018	Project R: Digital Marketing and E-commerce Program	Improve digital marketing skills and e-commerce capabilities.	In Progress	3,500,000 USD	7 months	3,200,000 USD	7 months	On Track
001-001-001-019	Project S: Public Health Campaign Program	Conduct public health campaigns to raise awareness and change behaviors.	Completed	2,500,000 USD	5 months	2,500,000 USD	5 months	On Track
001-001-001-020	Project T: Community Development Program	Support community-led development initiatives and local governance.	In Progress	6,000,000 USD	12 months	5,500,000 USD	12 months	On Track

Index	Project Name/ Participating Schools and Program/Project	William Lewis Program (Students)/Program (Schools)	Total William Lewis Program Budget 2022	William Lewis Program and Project Site Address Effective 2022-2023	Project Site Enrollment/Program Site Enrollment (2022)			Total Project Site Enrollment (2022)	William Lewis Program Budget	
					Project Site Enrollment 2022-2023	Enrollment Change 2022-2023	Total Project Site Enrollment 2022		William Lewis Program 2022	Total Project Site Enrollment 2022
1	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
2	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
3	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
4	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
5	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
6	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
7	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
8	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
9	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
10	William Lewis Program Participating Schools: 1000	William Lewis Program 1000	\$1,000,000.00	1000	1000	1000	1000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

1. $\vec{r}$ is the position vector of the particle with respect to the origin of the coordinate system.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Bab II pasal 2 yang mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan semakin meningkatkan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pada aspek pelayanan masyarakat. Di sisi lain, kondisi era globalisasi sebagai faktor eksternal merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selaku unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah akan memberikan dampak yang sangat besar pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat bahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau. Namun disini lain sering berubahnya regulasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat akan memperlambat proses penyaluran dana dan anggaran yang akan berdampak langsung pada proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendukung di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD dan pencapaian renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	TDR	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Perkiraan		Catatan Tambahan
				2023	2023	2024	2025	2023	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pelaksanaan Laporan Keuangan pemerintah Daerah sesuai SAP dan report Rasio			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi dan Operasional Pengelolaan Barang Milik Daerah			65	70	75	75	65	65	65	70	
3	Rata-Rata			75	75	75	75	75	75	75	75	

Sanggau, 5 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE. MM
NIP. 19671126 199503 2 004

2.3. ISU – ISU PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sanggau. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKAD Kabupaten Sanggau untuk Tahun 2025-2029.

Sebagai sebuah institusi, BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki hal – hal sebagai berikut:

- **Tantangan/Ancaman**

1. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
2. Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan.
3. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*.
6. Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal.
7. Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal.

- **Peluang**

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.
3. Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- **Kekuatan**

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klasifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang diberikan.
3. Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.

- **Kelemahan**

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah.
2. Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program / kegiatan pembangunan daerah.
3. "Idle Assets" (kekayaan/aset daerah yang belum dimanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas.
4. Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.

Tabel 2.5
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
• Sumber Daya Manusia yang tersedia serta sumber tenaga kerja yang terampil, terdidik dan terlatih • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Tujuan dan Lintasan yang ditetapkan • Ketersediaan sistem Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.	• Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdampak pada perubahan dasar hukum, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah • Ketersediaan sebagai daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program/ kegiatan pembangunan daerah • "Aset liar" (sukarya) (Aset daerah yang belum terinventarisasi belum teridentifikasi secara jelas • Keterbatasan sumber daya yang masih sangat kecil
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
• Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memadai dan memadai dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan laporan keuangan yang detail, efisien, transparan dan akuntabel • Kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa ditingkatkan • Inovasi teknologi aset daerah yang masih bisa dimanfaatkan • Penguatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Akumulasi data dan kebijakan dalam perencanaan anggaran kegiatan • Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang belum dimanfaatkan • Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset • Penguatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset • Tuntutan masyarakat terhadap publik secara global pemerintah • Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal • Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan urusan keuangan pemerintahan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Belum Optimal	Regulasi Barang Milik Daerah yang belum memadai	- Kebijakan peraturan Barang Milik Daerah yang tersedia belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini. - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya menerapkan 3 unsur penting yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
		Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara optimal	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal dan sesuai regulasi yang ada. - Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah seperti sertifikat, DPKB, NP4D dan EAST khusus Barang Milik Daerah hibah. - Kualitas SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SDM Penatausahaan Aset pada Perangkat Daerah belum memadai.
2	Belum terwujudnya Aplikasi Keuangan dan Pengelolaan Aset yang	Keterlambatan penyempulan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Adanya pergantian petugas akuntansi dan penyusun laporan keuangan karena promosi dan mutasi dimana penggunaan ASN bukanlah wewenang dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	terintegrasi		BPKAD melalui BKPSDM: • Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempengaruhi proses penyusunan Neraca Aset sehingga berdampak pada penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan. • Dinamisnya perubahan kebijakan dan Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah. • Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang menopang pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah. • Belum adanya tenaga IT yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bidang Akuntansi yang memahami secara detail aplikasi pengelolaan keuangan guna mendukung percepatan penyampaian informasi pelaporan keuangan daerah.
3	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Perencanaan anggaran perangkat daerah belum optimal	Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja	- Kualitas SDM pejabat perencanaan keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. - Pejabat yang ditunjuk kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah belum maksimal	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD	- Kualitas SDM pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. - Kualifikasi pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran banyak yang tidak memenuhi syarat. - Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset.
2. Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik.
3. Persepsi yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah.
4. Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas.
5. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
6. Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan.
7. Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja.
8. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban bulanan skpd.

Bertitik tolak dari isu-isu strategi Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Sanggau, maka ditetapkan beberapa isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sanggau.
3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
4. Kualitas pelayanan publik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada RKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tidak mengalami Perubahan yang signifikan dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2019-2024, namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan perjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau.

Untuk selengkapnya, review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Perencanaan Awal 2020			Realisasi Anggaran, Revisi Anggaran			Tipe Kegiatan	Status
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		
13	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	10 Laporan	Rp. 30.241.271,43	Pengkajian dan Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020)	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020)	10 Laporan	Sub Kabupaten	
14	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
15	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
16	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
17	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
18	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
19	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	
20	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (Pengkajian Potensi 2020)	Sub Kabupaten	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah / Kecamatan (2020) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan (2020)	5 Laporan	Rp. 15.120.635,71	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	Asistensi dan Pendampingan Kegiatan Pengkajian Potensi (2020)	5 Laporan	Sub Kabupaten	

Rencana Kerja 2020					Hasil Akhir/ Substansi					Capaian Peningkatan	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Substansi/ Bidang	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Target Capaian	Substansi/ Bidang	Target Capaian	Substansi/ Bidang	Capaian Peningkatan
18	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 10.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	18
19	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	19
20	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	20
21	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	21
22	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	22
23	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	23
24	Program Kerja	di Kabupaten	Substansi/ Bidang yang	2019	Rp. 1.000.000.000,00	Program Kerja	2019	Substansi/ Bidang yang	2019	Substansi/ Bidang	24

No	Kegiatan Awal 2022				Kegiatan Akhir 2022				Kumulatif Revisi			Catatan Penting
	Program/Regulasi	Salinan Rancangan	Tanggal Kegiatan	Pagu Indikasi	Program/Regulasi	Salinan Rancangan	Tanggal Kegiatan	Pagu Indikasi	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Kumulatif Revisi	
4.3	Penelitian dan Pengujian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	0	0	
4.4	Penelitian dan Pengujian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	0	0	
4.5	Penelitian dan Pengujian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	0	0	
4.6	Penelitian dan Pengujian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	0	0	
4.7	Penelitian dan Pengujian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	Penelitian Perencanaan	0	0	Penelitian Perencanaan	0	0	

[illegible]

[illegible]

ID	Program/Regulation	Programmer Data Entry			Programmer Data Entry			Programmer Data Entry			Status
		Category	Subcategory	Value	Category	Subcategory	Value	Category	Subcategory	Value	
1	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
2	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
3	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
4	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
5	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
6	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
7	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
8	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
9	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active
10	Programmer Data Entry	Category 1	Subcategory 1	Value 1	Category 2	Subcategory 2	Value 2	Category 3	Subcategory 3	Value 3	Active

No	Programme Area RPPF				Main Activity Schedule				Calendar Planning
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
71	Pembinaan Program Daring With Us Pembinaan Subsektor/ Kec	Kec. Sungai	Jumlah orang yang mendapat pembinaan program daring oleh tim teknis/ subsektor/ kecamatan/ kecamatan pengembangan	100%	Rp. 75.000.000,00	Pembinaan Program Daring With Us Pembinaan Subsektor/ Kec	Jumlah orang yang mendapat pembinaan program daring oleh tim teknis/ subsektor/ kecamatan/ kecamatan pengembangan	100%	Rp. 75.000.000,00
Jumlah					Rp. 800.000.000,00	Rp. 800.000.000,00			800.000.000,00

Disetujui:  01 Juli 2020
 Kepala Dinas
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Bantul

Disetujui:  01 Juli 2020
 Kepala Dinas
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Bantul

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan BPKAD Kabupaten Sanggau.

Mengingat BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dari akuntabel.

Untuk selanjutnya, program dan kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Sanggau
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan

Sanggau, 9 Juli 2025
 KEPALA PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



SILVESTRA DAYANA SEMBOLON, SE., MM
 NIP. 19671126 199503 2 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa Kebijakan Nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan Pemerintah Daerah termasuk Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan;
4. Percepatan dan pentapalan target Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goal's (MDG's).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai visi daerah, aspirasi, dan dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (Tahun 2019-2024), maka visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2025-2029 adalah:

"SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN"

Adapun makna dari visi tersebut yaitu:

1. **"Maju Berkelanjutan"** menunjukkan kondisi semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya. Beberapa indikator pembangunan daerah yang menjadi fokus pada masa RPJMD tahun 2025-2029 meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan.

2. **"Berkeadilan"** menunjukkan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang. Kabupaten Sanggau memiliki ciri khas latar belakang budaya yang beragam karena memiliki penduduk dari berbagai jenis suku dan agama. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan akan memberikan aspek keadilan bagi setiap suku dan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD

3.2.1. Tujuan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi BPKAD Kabupaten Sanggau dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Dimana tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga;
3. Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tertib dan akuntabel;
4. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur sesuai ketentuan.

3.2.2. Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sanggau

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Terdidik dan terlatihnya aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi;
2. Tersusunnya rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja;
3. Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu;
4. Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 tersebut didukung oleh 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar.
2. Melanjutkan peningkatan perekonomian masyarakat.
3. Melanjutkan peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul.
4. Melestarikan adat budaya dan lingkungan hidup yang bermartabat.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan aparatur sipil negara yang profesional.
6. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
7. Meningkatkan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama.
8. Mewujudkan pembangunan daerah perbatasan negara yang maju.

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang harus dicapai adalah "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator daerah (indikator tujuan dan sasaran) opini BPK terhadap laporan keuangan".

Beberapa upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil.
3. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektivitas penerapan SAKIP khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dan ingin dicapai dalam tahun anggaran tahun 2026 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp328.529.517.149,36.

Berikut terlampir Tabel yang berisi Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

Code	Uraian Piliang/Detail Pembelian/Detail dan Program/Program	Indikator Kinerja Program/Program	Berkas/Detail				Pembelian Mula, Rencana Tahun	
			2024				2027	
			Item	Target Output Rencana	Subsidi Detail/Detail	Detail Detail	Target Output Rencana	Subsidi Detail/Detail
11	11	11	11	11	11	11	11	11
5.02.02	PROGRAM PERBUKLAHAN KEBUDUKAN DAERAH	Program Seleksi dan Seleksi dalam pengelolaan keuangan daerah (PS) Program ini menghasilkan keuangan pemerintah daerah untuk dapat terjadi secara (PS)	Rab. Sengas	100%	Rp. 312.384.116.888.00	APBD Rab Sengas	100.00%	Rp. 312.384.116.888.00
5.02.02.1.01	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.01	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.02	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.03	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.04	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.05	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.06	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.07	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53
5.02.02.1.01.08	Kendaraan dan Peralengkapan Anggaran Daerah	Program Seleksi dan Seleksi Anggaran APBD dan pembelian APBD	Rab. Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53	APBD Rab Sengas	100%	Rp. 3.072.643.872.53

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KABUPATEN SANGGAU

Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan mencakupi penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sanggau telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub-kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Dari seluruh sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2026 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

➤ Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pengadaan Mebel

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - ❖ Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - ❖ Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
- ❖ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Verifikasi Pendapatan
 - ❖ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - ❖ Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - ❖ Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ❖ Analisa Investasi Pemerintah Daerah
 - ❖ Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan
 - ❖ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Standar Harga
 - ❖ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah

- ❖ Inventarisasi Barang Milik Daerah
- ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ❖ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ❖ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) Kabupaten Sanggau menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (Tata kelola pemerintah yang baik) sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2029.

Rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2026. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja BPKAD Tahun 2026 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang

telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau pada umumnya.